

UPACARA MELASTI: Umat Hindu mengikuti Upacara Melasti di Pura Segara Ukir, Pantai Ngobaran, Saptosari, Gunungkidul, Selasa (15/2). Acara yang diikuti sejumlah umat Hindu dari DIY, Jawa Tengah, dan Bali itu menjadi sarana penyucian diri untuk menyambut Hari Raya Nyepi.

TERMASUK DI DIY-JATENG

15-21 Februari Potensi Hujan Meningkat

JAKARTA (**KR**) - Potensi hujan akan meningkat secara signifikan selama sepekan mendatang pada 15-21 Februari 2022, menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dirilis di Jakarta, Selasa (15/2).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, potensi hujan akan meningkat secara signifikan di wilayah Indonesia bagian Barat pada periode 15-18 Februari, meliputi wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sementara pada 19-21 Februari potensi hujan lebat akan

bergeser ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur, termasuk di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas Madden Julian Oscillation atau MJO yang diprediksi aktif dalam periode sepekan ke depan," ujar Guswanto sebagaimana dikutip Antara.

Dijelaskan, indeks-indeks global seperti Southern Oscillation

(-0,58) dan Indian Ocean Dipole atau IOD (-0,70) menunjukkan nilai yang signifikan, kondisi ini mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan baik wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.

"Aktivitas Madden Julian Oscillation atau MJO saat ini berada pada Fase 3 dan diprediksi dalam sepekan ke depan akan berada pada Fase 3 (Indian Ocean) hingga Fase 4 (Maritiem Continent). Kondisi MJO pada fase ini akan meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian Barat hingga bagian tengah," ujar Guswanto.

Sementara itu prediksi kondisi gelombang atmosfer baik Equatorial Rossby dan Kelvin cukup signifikan pada periode sepekan

Index atau SOI (+10,5), NINO3,4 ke depan di wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Hal ini sejalan dengan prediksi Outgoing Longwave Radiation atau OLR yang menunjukkan anomali basah pada sepekan ke depan, terutama Pesisir Barat Sumatera hingga Selatan Jawa.

Pada skala regional, Indeks Surge dan Indeks Cross Equatorial Northerly Surge atau CENS cenderung diprakirakan akan signifikan pada akhir minggu, hal ini mengindikasikan adanya seruakan massa udara dingin dari Benua Asia.

Kondisi angin Gradien dominan Barat-Barat Laut dan angin Monsun Australia diprediksi akan banyak membentuk area konvergensi di sepanjang wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bagian Selatan. (San)-d

MARAK PENIPUAN BANTUAN PESANTREN

Kemenag: Laporkan Pihak Berwajib

JAKARTA (KR) - Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag menerima banyak laporan terkait modus penipuan bantuan pesantren. Dilaporkan bahwa modus penipuan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenag dengan menjanjikan bantuan dan memungut biaya.

Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur meminta masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah percaya jika ada yang menawarkan janji untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama. "Jangan mudah percaya, laporkan saja ke pihak berwajib," tegas Waryono di Surabaya, Senin (14/2).

Menurut Waryono, pihaknya tidak pernah memungut biaya atas setiap program bantuan yang diberikan kepada pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Karenanya, jika ada info bantuan yang diklaim berasal Kemenag, namun mensyaratkan biaya yang harus dikirimkan ke nomor rekening tertentu, maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias penipuan.

"Semua layanan publik di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tidak mensyaratkan pembayaran atau meminta biaya apa pun, demikian halnya dengan layanan bantuan, pada tahun 2022 ini seluruh pengajuan bantuan dilakukan secara online," jelas Waryono Abdul Ghofur.

Waryono mengaku telah bekerja sama dengan pihak berwajib dan berhasil menangkap salah satu oknum yang diduga pelaku tindak penipuan di Kalimantan Barat. "Pelaku penipuan menggunakan modus operandi yang beragam, tetapi ujung-ujungnya selalu ada permintaan sejumlah uang. Untuk menghindari penipuan, setiap informasi yang diterima bisa dikonfirmasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota setempat," tutupnya.

PADAT KARYA BIDANG SDA PUPR Targetkan Serap 350.104 Naker

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko berharap rencana Program Padat Karya Bidang SDA untuk tahun 2022 ini mampu menyerap 350.104 tenaga kerja (naker).

"Pada tahun 2022 direncanakan Program Padat Karya dengan alokasi dana sebesar Rp 4,85 triliun," ujar Jarot dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (15/2).

Jarot Widyoko mengatakan, rincian kegiatan Program Padat Karya Bidang SDA tahun ini terdiri Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebesar Rp 2,25 triliun di 10,000 lokasi, dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 179.141 orang.

Kemudian Program Padat Karya Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) sebesar Rp 145 miliar di 580 lokasi dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 4.640 orang.

Selanjutnya Program Padat Karya Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA sebesar Rp 2,45 triliun di 14.199 lokasi dengan target serapan 166.323 naker.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Program Padat Karya pada tahun 2021 telah menyerap 1,8 juta pekerja. Rincian realisasi pelaksanaan Program Pola Padat Karya 2021 Khusus Bidang Sumber Daya Air telah menyerap 361.771 pekerja.

MARAK PENIPUAN BINARY OPTION

OJK Imbau Masyarakat Hati-hati

JAKARTA (**KR**) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau ma- fluencer agar dalam memasarkan kita mencoba-coba jenis investasi syarakat untuk berhati-hati seiring produk dan layanan jasa keuangan, yang tidak sedikit ternyata ilegal. maraknya kasus penipuan binary option dan robot trading forex belakangan ini.

"Apabila ditawari investasi, pastikan terlebih dahulu legalitas perusahaan serta produknya," kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/2).

Dijelaskan, binary option merupakan salah satu bentuk trading online dimana para trader memprediksi atau menebak naik-turunnya harga sebuah aset pada jangka waktu tertentu. Sedangkan robot trading forex adalah program perangkat lunak otomatis yang memungkinkan pedagang menghasilkan sinyal perdagangan atau memesan, dan mengelola perdagangan di pasar valas.

Sekar menyampaikan, OJK tidak pernah mengeluarkan izin untuk binary option dan robot trading forex. "OJK juga tegas melarang bank memfasilitasi binary option dan robot trading forex yang patut mengandung penipuan, perjudian, atau skema ponzi," ujar Sekar sebagaimana dilansir Antara.

OJK juga mengingatkan para inselalu memastikan terlebih dahulu produk dan layanan keuangan tersebut telah memiliki izin (legal) dari lembaga yang berwenang di Indonesia, agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi ilegal.

Sekar menambahkan, untuk aset kripto dan produk perdagangan berjangka komoditas (emas, valuta asing, dan lainnya) bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK. Namun perizinan, pengaturan, dan pengawasannya berada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Pengamat ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, banyaknya kasus binary option salah satunya disebabkan kurangnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Selain itu, masyarakat tergiur keuntungan yang besar dengan cara relatif instan, tanpa mempertimbangkan risikonya, namun hanya dengan menebak naik atau turunnya sebuah aset.

"Ada dua sisi kenapa masyarakat Sisi pertama dari sisi masyarakatnya yang ingin mendapatkan keuntungan secara kilat, namun tidak memiliki literasi digital dan keuangan yang kuat," ujar Nailul.

Binary option merupakan salah satu bentuk trading online dimana para trader memprediksi atau menebak naik-turunnya harga sebuah aset pada jangka waktu tertentu.

Ia menjelaskan, masyarakat yang memiliki literasi keuangan dan digital yang rendah, menjadi sasaran empuk dari penjaja investasi bodong. Tercatat, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini baru sebesar 38,03 persen dan indeks literasi digital Indonesia berada di level 3,49 pada 2021.

"Literasi digital kita terhitung masih buruk yang dapat dilihat dari semakin maraknya kasus pencurian data digital hingga penipuan online. Literasi keuangan juga masih sangat rendah," kata Nailul.

Bahkan, lanjutnya, jika dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan, indeks literasi keuangan dan digital masyarakat Indonesia masih jauh lebih rendah. (San)-d

KASUS TPPU PERPAJAKAN

KPK Tetapkan Angin Prayitno Tersangka

rupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan itu merupakan hasil pengembangan dari kasus suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017, yang sebelumnya juga menjerat Angin seba-

gai tersangka. Tim Penyidik KPK telah mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi perpajakan tahun 2016-2017 pada Ditjen Pajak Kemenkeu. "Dan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kembali menetapkan APA sebagai tersangka terkait dugaan TPPU," kata Pelaksana Tugas

JAKARTA (KR) - Ko- (Plt) Juru Bicara KPK Ali Sebelumnya, Majelis

Dijelaskan, Tim Penyidik KPK menduga kuat tersangka Angin sengaja menyembunyikan menyamarkan asal usul harta kekayaannya, yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi (tipikor). Untuk itu, ujar Ali, dalam rangka melengkapi bukti yang telah KPK miliki, pengumpulan bukti masih terus dilakukan.

"Untuk perkembangan akan diinformasikan," kata Ali. Sehubungan hal itu, imbuhnya, KPK memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU untuk tersangka APA. Kelima saksi ini, menurut Ali, merupakan pihak swasta, yakni Marisah, Moh Anwar, Amat, Aswita, dan Endang. Sedangkan pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor

misi Pemberantasan Ko- Fikri di Jakarta, Selasa Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuh kan vonis terhadap Angin dalam perkara suap, dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp 300 juta subsider dua bulan kurungan.

> Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Dadan Ramdani dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

> Dalam putusan, Angin dan Dadan juga dijatuhi hukuman pidana tambahan, masing-masing membayar uang pengganti Rp 3,375 miliar dan 1,095 juta dolar Singapura. Terkait perkara itu, Angin membuat kebijakan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan terhadap wajib pajak.

KURANGI BEBAN ADMINISTRATIF

Aplikasi ARKAS dengan SIPD Diintegrasikan

JAKARTA (KR) - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim resmi meluncurkan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk sekolah sebagai aplikasi tunggal perencanaan dan pelaporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

"Sekarang, kita pindah dengan satu aplikasi tunggal yang memudahkan proses bagi tiap sekolah. Dengan adanya ARKAS dan MARKAS, sekolah cukup memasukkan informasi rencana dan anggaran cukup ke satu aplikasi yang sudah satu dengan SIPD dan Dapodik," ucap Mendikbudristek pada Peluncuran Merdeka

Belajar Episode Keenam Belas: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan secara daring, Selasa (15/2).

Menteri Nadiem mengatakan, sistem pengelolaan anggaran sekolah akan menyatu dengan sistem pengelolaan daerah. Selain itu, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek, juga akan terhubung dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). ARKAS yang dipakai sekolah akan terintegrasi otomatis dengan Manajemen ARKAS (MARKAS), yaitu aplikasi tunggal bagi dinas pendidikan untuk mengelola Dana BOS. MARKAS pun terintegrasi dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jadi untuk sekolah memakai ARKAS. Dinas Pendidikan

memakai MARKAS," tegasnya.

Sebelumnya, sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah. "Dahulu, sekolah merencanakan dan melaporkan anggaran manual dua kali, yaitu di sistem dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pusat. Dampaknya, sekolah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk hal administratif. Ini ingin kita hindari, karena kita ingin sekolahsekolah kita fokus kepada muridmurid dan bukan hal-hal administratif," terang Nadiem.

Pengelolaan Dana BOS, diharapkan Mendikbudristek, lebih akurat dan bertanggung jawab dengan kehadiran ARKAS dan MARKAS yang terintegrasi dengan SIPD. Sebelumnya, terdapat beberapa aplikasi pengelolaan anggaran yang dipakai sekolah. (Ati)-f



 $PENYEMPROTAN\ DISINFEKTAN:\ Petugas\ Polres\ Pekalongan\ menyemprotkan$ cairan disinfektan ke salah satu ruangan di Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (15/2). Penyemprotan itu dilakukan setelah 33 dari 780 pelajar dinyatakan positif Covid-19 tanpa gejala dan pembelajaran dilakukan secara daring.